

ABSTRAK

Eman Hermawan, MKN.03.VI.15.0276, Program Magister (S2) Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2017, Kekuatan Hukum *Covernote* serta tanggungjawab Notaris Terhadap Pembuatan *Covernote* sebagai produk hukum yang tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Kehidupan masyarakat memerlukan kepastian hukum diantaranya pada sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat itu sendiri atas adanya suatu pelayanan jasa, dasar hukum *Covernote* juga tidak diatur dalam peraturan perundang- undangan baik dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 *atas Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 *tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, maupun pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 *tentang Hak Tanggungan* serta Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 *tentang Perbankan*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, mengkaji Norma-norma hukum berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan *Covernote*, dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Kemudian data dianalisa dengan metode deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Covernote* yang dikeluarkan Notaris tidak memiliki kekuatan hukum sebagai *ambtelijke acte*. Sehingga *covernote* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara hukum (*legal binding*) dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris bertanggungjawab penuh atas *covernote* yang dikeluarkan, baik pertanggungjawaban perdata, maupun pertanggungjawaban pidana. Dan akibat hukum Notaris terhadap *covernote* yang dikeluarkan tidak terpenuhi, Notaris dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana. Secara Hukum Perdata apabila *covernote* mengakibatkan kerugian bagi para pihak akibat kelalaian Notaris sesuai ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata dan 1367 KUP Perdata, sedangkan secara pidana apabila terbukti turut serta memberikan keterangan palsu mengenai isi *covernote*, sesuai ketentuan Pasal 263 (1) KUHP, Pasal 264 KUHP dan Pasal 265 KUHP.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Notaris, *Covernote*

ABSTRACT

Eman Hermawan, MKN.03.VI.15.0276, Master Program (S2) Notary Semarang Sultan Agung Islamic University in 2017, the Power Law Notary *Covernote* and responsibilities Against Making *Covernote* as a legal product that is not regulated in Law Notary, community life requires certainty legal services including the public sector is currently growing along with the increasing needs of the society itself on the existence of services, the legal basis *Covernote* also not regulated in the legislation both in law No. 2 of 2014 on Amendment of law No. 30 of 2004 concerning Notary, Government Regulation No. 24 of 2014 on the Rules of Land Deed official Position, as well as in Law No. 4 of 1996 on Mortgage and Law No. 10 of 1998.

This research uses Normative Legal research, using *normative juridical* approach, reviewing the legal norms in the form of legislation relating to *Covernote*, using library research techniques. Then the data were analyzed with descriptive qualitative method.

The results showed that Covernote issued Notary does not have legal force as ambtelijke acte. So covernote not have binding legal force by law (*legally binding*) and do not have the strength of evidence is perfect. Notary fully responsible for covernote issued, either pertanggungjawabaan civil or criminal liability. Notary and legal effect issued terhapat covernote not met, the Notary can sue civilly or criminally. In the Civil Code if covernote result in losses for the parties due to negligence of the Notary pursuant to Article 1366 of the Civil Code and the 1367 CTP Civil, while criminally if proven participated giving false information about the contents covernote, in accordance with Article 263 (1) of the Criminal Code, Article 264 of the Criminal Code and Article 265 of the Criminal Code.

Key Words: *The Power of Law, Notary, Covernote*